

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
1.6 Kerangka Konsep	13
1.6.1 Konsep Hubungan Industrial	13
1.6.2 Ruang Lingkup Hubungan Industrial	15
1.6.3 Perselisihan Hubungan Industrial	17
1.6.4 Teori Civil Society	20
1.6.5 Konsep Hukum dalam Hubungan Industrial	23
1.6.6 Jenis Penyelesaian di Luar Pengadilan Hubungan Industrial	25
1.6.7 Konsep Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	28
1.6.8 Organisasi Sarekat Buruh	29

1.6.9 Sarana dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila	31
1.6.10 Problematika Hubungan Industrial di Indonesia	34
1.6.10.1 Persoalan-persoalan Hubungan Industrial	36
1.6.10.2 Solusi yang dilakukan Pemerintah	39
1.6.10.3 Tanggapan Buruh	42
BAB II METODE PENELITIAN	
2.1 Metode Penelitian	47
2.2 Lokasi Penelitian	48
2.3 Informan Penelitian	48
2.4 Sumber Data	56
2.4.1 Sumber Primer	56
2.4.2 Sumber Sekunder	57
2.5 Teknik Pengumpulan Data	57
2.5.1 Observasi	57
2.5.2 Wawancara Mendalam	61
2.6 Interpretasi Data	69
2.7 Analisa Data	70
2.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	71
2.9 Hambatan dalam Penelitian	72
BAB III DESKRIPSI WILAYAH KAJIAN	
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Muncar	72
3.2 Sejarah pt. Maya Muncar	74
3.3 Produk	76
3.4 Logo	76
3.5 Peta Lokasi Perusahaan	77
3.6 Selayang Pandang pt. Maya Muncar	77
3.7 Organisasi Buruh di Perusahaan PT. Maya Muncar	82
BAB IV DISFUNSI PEMERINTAH: PENANGANAN KASUS BURUH DI PT. MAYA MUNCAR	
4.1 Pengantar	89
4.2 Tuntutan Buruh	91

4.3	Protes Buruh Terhadap Perusahaan	97
4.4	Demo di Kantor Pemerintahan	102
4.5	Minimnya SDM di Disnakertrans	103
4.6	Disnakertrans Dinilai Tidak Tegas	107
4.7	Kebijakan Disnakertrans Cenderung Permisif.....	116
4.8	Keberpihakan Disnakertrans Terhadap Perusahaan	119
4.9	Lembaga Kerjasama Tripartit	123
4.10	Simpulan	126

BAB V DISINTEGRASI PERUSAHAAN TERHADAP BURUH:

MEMANGKAS TINDAKAN YANG DIANGGAP PATOLOGIS

5.1	Pengantar	129
5.2	Perusahaan Tidak Menanggapi Panggilan Disnakertrans	131
5.3	Perusahaan Melakukan Bujukan ke Rumah-rumah	137
5.4	Perusahaan Mengingkari Perjanjian Dengan Buruh	141
5.5	Perusahaan Melakukan Intimidasi	146
5.6	Perusahaan Melakukan Teror	150
5.7	Perusahaan Melakukan Pemecatan Sepihak	154
5.8	Sikap Perusahaan Setengah Hati Terhadap Buruh	159
5.9	Simpulan	164

BAB VI DISINTEGRASI ORGANISASI BURUH: SPN VS SPMM

6.1	Pengantar	166
6.2	Sarekat Buruh di Mata Perusahaan	169
6.3	Sarekat Buruh Tandingan	173
6.4	Sarekat Buruh Pecah	174
6.5	Berdirinya Dua Sarekat	179
6.6	Gejolak Antar Buruh	185
6.7	Simpulan	186

BAB VII PENUTUP

7.1	Kesimpulan	187
7.2	Saran	188

LAMPIRAN